

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi Sulistiyono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan 1*. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Kencana. Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Adam Mushi. 2015. *Teologi Konstitusi (Hak asasi Manusia atas Kebebasan beragama di Indonesia)*. LKiS Perinting Cemerlang. Yogyakarta.
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press. Malang.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Cetakan Pertama)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Bagir manan. 1994. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. C.V. Maju Mandar. Bandung.

- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Atma Jaya. Yogyakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi). Jakarta.
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar harapan. Jakarta.
- I. Gde Panca Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005)*.
- , 2006. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2011. *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2014. *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- , 2018. *Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Pres. Jakarta.
- Mahendra Kurniawan, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Cetakan Pertama. Kreasi Total Media. Yogyakarta.

- Maria Farida Indriati. S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2010. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2020. *Ilmu Perundang-undangan I*. Kanisius. Yogyakarta.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945 (Cetakan Pertama)*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta.
- Made Nurmawati dan I Gde Marhaendra Wija Atmaja. 2017. *Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang—Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum dan demokrasi & Judicial Review*. UII Press. Yogyakarta.
- , 2012. *Hukum Tata Negara (edisi revisi ke-6)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pokja Penyusunan DPHN. 2019. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Design Pembangunan Hukum Nasional)*. BPHN Kemenkumham. Jakarta.
- Rosjidi Anggawidjaja. 1998. *Pengantar ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Ridwan H.R.. 2006. *Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-3*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta,

- , 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII press. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- , 2012, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. PT. Perca. Jakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka. Jakarta.

DISERTASI :

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Pasca sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Romi Librayanto. 2016. *Sistem Norma dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Di Indonesia)*. Program Doktor, Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

JURNAL :

- A'an Efendi, *Problematik Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Jember, VeJ Volume 5 Nomor 1, hlm. 33, Sumber: <https://journal.unpar.ac.id>*.

- Anonim, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019 129.
- Cipto Prayitno, *Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Constitutionality Analysis Limitation Authority of the President in the Stipulation of Government Regulation)*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020. Melalui : file:///C:/Users/asus/Downloads/1515-3819-1-PB.pdf diakses pada 14 Juli 2022 Pukul 01.22 WITA.
- Herlina, N., *Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* Lex Librum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Paulus E Lotulung dalam Zulkarnain Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia*, *Jurnal, Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012, diakses 15 Oktober 2021.
- Satjipto Rahardjo, dalam Nurhadiantomo, *“Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat”*, *Pranata Hukum*, Vol.1, Nomor 1 Januari 2006.
- Syihabuddin, *Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, *JURNAL HUKUM*. NO. 23, VOL 10, Mei, 2003, :46 – 71, Sumber: <https://journal.uin.ac.id> › article › download, diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 15.10 WITA.
- Sri Nur Hari Susanto, *Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, *Administrative Law And Governance Journal*, Volume 3, Issue 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, November 2020.
- Wicipto setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal*

Legislasi Indonesia, Vol. 6 , No. 4 , Desember, 2009 . Sumber:
<https://e-jurnal.peraturan.go.id › article › viewFile>, Diakses Pada 24
Oktober 2021, Pukul 16.15 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan)
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

INTERNET :

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19. 1 Maret 2020. Sumber: <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>. Diakses 02 Agustus 2021.

Khadijah Nur Azizah, 10 Februari 2021, *Dugaan Kasus Pertama Virus Corona di China Terdeteksi pada November 2019*, Sumber : <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5004285/dugaan-kasus-pertama-virus-corona-di-china-terdeteksi-pada-november-2019>, 06 Mei 2021, diakses pada 04 Agustus 2021, Pukul 22.28 WITA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. <https://www.kemkes.go.id/>, dan <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>, Diakses pada 04 Agustus 2021, Pukul 23.40 WITA.

Ihsanuddin, 03 Maret 2021, *"Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia"*, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, Diakses pada 04 Agustus 21, Pukul 22.40 WITA.

CNN Indonesia. "Jimly: 'Salus Populi Suprema Lex Esto' Belum Bisa Digunakan". 19 Maret 2021. Diakses 05 September 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319061501-20-619425/jimly-salus-populi-suprema-lex-esto-belum-bisa-digunakan>.

Barratut Taqiyya Rafie, "Ada 9 Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, apa saja efek sampingnya?", Sumber: <https://newssetup.kontan.co.id/news/ada-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya?page=all>.

Rina Ayu Panca Rini, 2020, *Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan*, Sumber: <https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-di-masyarakat-soal-keamanan>. Diakses Pada Desember 2021.

Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiology: 'Pemaksaan tidak akan berhasil', 15 Februari 2021, Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572/>

Singgih Wiryono , 18 Desember 2020, *Perda DKI soal Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksin Covid-19 Digugat ke MA*, Sumber :<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/18/12060821/perda-dki-soal-denda-rp-5-juta-bagi-penolak-vaksin-covid-19-digugat-ke-ma?page=all>, Diakses Pada 15 September 2021, Pukul 23.11 Wita.

Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. Yang dikutip dari Tulisan Jimly Assidique *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm. 1. Sumber: https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses 23 Oktober 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (artikel online), www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

http://www.researchgate.net/publication/327863384_Rekonstruksi_Hirarki_Peraturan_Perundangundangan_Di_Indonesia_Rekonstruktion_Of_The_Hierarchy_Of_Legislation_In_Indonesia. Diakses Pada 15 Oktober 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>- Diakses Pada 24 Oktober 2021, Pukul 16.40 Wita.

<https://covid19.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2022 Pukul 00.53 WITA.

Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 16.00 WITA.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09 WITA.

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/4341-belajarlah-dari-selandia-baru-negara-penanganan-kasus-covid-19-terbaik-di-dunia>.

CNN Indonesia "Selandia Baru Cabut Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19"
: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220323104042-113-775024/selandia-baru-cabut-aturan-wajib-vaksinasi-covid-19>.

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/2022032510321533325948/singapura-berdamai-dengan-covid-masker-tak-wajib-lagi>.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6279c2db36d1d/perpres-vaksin-covid-kalah-uji-materiil--pemerintah-bisa-digugat-warga-muslim/>.

LAIN-LAIN :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Digital Edisi V).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta